

Wawancara "Sgl" dengan Nurman Sulti dan Ajis Karang

Masih Banyak Kendala Modal Masuk ke Sumbar

** Pelita IV: Daya Serap Tenaga Kerja Menurun*

Padang, Januari (Sgl).-

KERANCUAN status tanah di Sumatera Barat merupakan kendala dalam usaha mengembangkan penanaman modal di daerah ini, terutama untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN). Khusus untuk penanaman modal asing (PMA) rintangan yang dirasakan adalah perekonomian yang berskala kecil, sehingga kurang diminati investor dari luar negeri.

Drs. Nurman Sulti, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Sumbar dalam wawancara khusus akhir tahun dengan Singgalang kemarin di ruang kerjanya, Jln. S. Parman, menilai bahwa usaha perekonomian di Sumatera Barat masih dilakukan dalam bentuk sambilan, sehingga hasilnya tidak surplus. Padahal, menurutnya, investor dari luar

negeri lebih tertarik akan potensi yang surplus itu, sehingga mereka mau menanamkan modalnya di bidang industri. "Ya, ketimbang sektor lain, investor asing lebih tertarik di sektor industri ini," katanya menjelaskan.

PERSOALAN TANAH

Diwawancarai dalam dua babak -karena ada halangan- Nurman mengupas lebih jauh persoalan tanah sebagai lokasi proyek penanaman modal tersebut.

Menurutnya, ada dua kendala sehingga usaha mengembangkan investasi lebih besar di daerah ini sering terbentur. Kendala pertama adalah interen dalam daerah sendiri, yaitu di bidang prosedural. Sering pengusaha-pengusaha yang ingin menanam modalnya di daerah ini merasa dipersulit. Padahal tujuan dibentuknya BKPMMD ini adalah untuk mempermudah prosedur tersebut. Namun,

kenyataannya, diakui mempermudah prosedur itu tidaklah mudah. Banyak kewenangan-kewenangan berbagai instansi yang mesti ditempuh, terutama dalam hal pembebasan tanah yang ternyata di daerah ini sering menjadi problema.

Menurut pengamatannya, sebagai sumber dari problema ini adalah karena ketidakjelasan status tanah. Mana yang tanah negara, mana tanah ulayat dan ma-

na pula kawasan hutan, seakan berbaur karena tidak ada lagi batas-batas yang otentik, baik secara teknis (surat-surat) maupun secara faktual di lapangan (tanda-tanda batas). "Sebenarnya batas-batas itu ada, tapi kabur. Banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui bahwa tanah ulayat mereka sudah masuk kawasan hutan," kata Nurman.

Akibat dari batas yang kabur ini,

Ke hal 11 kol 2-6

Ka. Irwilkab Agam Menjelaskan Kalau Sudah Selesai, Uangnya Bisa Diambil

Padang, Januari (Sgl).

MENANGGAPI berita "Sgl" Sabtu (31/12-1988), yang berjudul "Uangnya Diambil Irwilkab Agam, Kepala Desa Minta Bantu BPKP", Kepala Irwilkab Agam Drs. Basril Thaheer menjelaskan, bahwa uang sebanyak Rp400.000 itu bukan disimpan pribadi Ka. Irwilkab, tapi ada pada bendaharawan kantor inspektorat tersebut. Uang itu bisa diambil setiap saat, kalau per-

hubungan terjadinya keributan dalam pemasangan listrik masuk desa di Desa Kampung Baruh, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Uang itu ditahan sebagai jaminan /honorarium dari instalator CV Omega untuk dua kepala desa, masing-masing Kepala Desa Kampung Baruh dan Kampung Atas.

Dalam surat tertanggal 27 Desember 1988, Kepala Desa Kam-



Drs. Nurman Sulti. (Foto YS).

MASIH.....

pihak investor menghadapi dua pihak, instansi pemerintah dan masyarakat.

Lebih jauh, tentang persoalan tanah ini, Nurman melihat adanya kecendrung yang terlalu boros sementara ninik mamak memberikan tanah ulayatnya kepada investor. Padahal, tanah adalah aset utama masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masa depan. Karena adanya kemajuan dan iklim yang membaik, diantaranya anggota mereka merasa tergiur. Tapi tanah sudah terdorong diberikan pada pihak lain. "Sengketa pun juga bisa bersumber dari masalah ini," katanya menganalisa.

Dengan tindakan-tindakan ninik mamak atau anggota masyarakat memberikan tanah mereka secara berlebihan itu, berarti mereka hanya memikirkan hari ini dan bukan masa depan anak cucunya.

Khusus dalam persoalan tanah ini, Nurman meminta semua lembaga yang terkait dapat menanggulangi secara bersama dengan penuh keterbukaan. Dan mereka yang banyak punya tanah diharapkan bisa mengolah sendiri dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada, imbau Nurman.

SKALA KECIL

Kendala kedua pengembangan investasi yang dikemukakan Nurman adalah kendala eksteren yang bersumber dari pola perekonomian yang berskala kecil atau masih tergolong sambilan. Kondisi yang semacam ini menyulitkan pihaknya menarik minat investor asing (PMA).

Katanya, investor asing lebih memperhatikan sektor industri. Meski daerah ini berpotensi, terutama bidang perkebunan namun belum menghasilkan yang lebih menggiurkan. Ini adalah karena digarap dalam skala kecil, atau sambilan belaka.

Ditahun-tahun mendatang, keadaan ini diusahakan meningkat dan mengarah ke skala sedang dan seterusnya skala besar. Artinya, usaha-usaha yang akan dilakukan itu digarap secara profesional. Dengan cara demikian, akan melahirkan surplus yang lebih



Drs. Ajis Karang

besar-pula sehingga bisa menjadi daya tarik pemegang modal.

Sebenarnya, kata Nurman, BKPM telah berusaha maksimal melakukan terobosan dengan mengeksplor potensi daerah ini lengkap dengan profil projectnya, baik skop Sumatera Barat maupun per-daerah tingkat II. Melakukan berbagai promosi atau kontak-kontak langsung dengan pengusaha-pengusaha dan melakukan jaringan/kerjasama antar BKPM di Indonesia.

Drs. Ajis Karang, Kabid Perekonomian Bappeda Sumbar yang diwawancarai mewakili Ketua Bappeda, mengakui kendala-kendala yang dikemukakan Nurman. Ia menambah, kendala lainnya seperti komoditi yang dikembangkan di Indonesia juga sedang diupayakan pula di negara tetangga, akibatnya persaingan menjadi ketat. Tingkat upah, inflasi dan marketing (kontinuitas) penyediaan barang juga merupakan penghalang yang belum bisa dipecahkan. Dari segi kedaerahan, hanya 20 persen daerah Sumbar yang bisa dimanfaatkan untuk investasi perkebunan dan pertanian karena tofografi daerah yang berbukit-bukit dan curam.

PELUANG

Menatap masa depan investasi di Ranah Minang ini, baik Nurman maupun Drs. Ajis Karang, Kabid Perekonomian Bappeda Sumbar yang juga dihubungi, merasa optimis akan mencapai hasil yang lebih baik berkat lahirnya berbagai kebijaksanaan pemerintah -Paket Desember dan Nopembernya- yang memberikan angin segar bagi para pemegang modal untuk menanamkan investasi mereka di da-

erah. Namun persoalannya tergantung bagaimana para pengusaha dan masyarakat bisa memanfaatkan iklim ini dengan baik. Artinya kita harus cepat tanggap dalam menerjemahkannya. Khusus mengenai kemungkinan ini, kata Nurman, pihaknya akan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Unand untuk membahas berbagai peluang yang ada.

Suatu hal yang jelas, kata Nurman, prospek masa mendatang lebih terbuka pada peningkatan ekspor non migas. "Ya, sesuai penggarisan pemerintah, investasi diarahkan untuk kepentingan ekspor. Tidak ada istilah prioritas untuk satu komoditi apapun. Peluang dibuka untuk semua bidang," tegasnya.

Meski diarahkan pada komoditi ekspor, investasi yang lebih membuka lapangan kerja yang luas dan sektor pertanian, industri dan pariwisata akan tetap mendapat perhatian. Demikian juga investasi untuk daerah tingkat II yang merupakan juga salah satu usaha pengembangan wilayah. Pasaman Barat, Sawahlunto Sijunjung, 50 Kota dan Agam tetap akan didominasi oleh sektor perkebunan, sementara daerah lain yang tak juga ketinggalan, akan diusahakan investasi yang cocok dengan kondisi daerah, misal pariwisata.

Khusus mengenai Hak Guna Usaha (HGU) yang telah keluar tapi tidak dimanfaatkan, Nurman